

**PERAN PERHUTANI TERHADAP MASYARAKAT PETANI HUTAN PADA
PENGEMBALAAN LIAR (STUDI KASUS RPH KEPOH JAWA TENGAH
INDONESIA)**

OLEH

CINDY YOELAND VIOLETA¹⁾ BAINAH SARI DEWI²⁾ SUGENG P. HARIANTO³⁾

Jurusan Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung

Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

Email : bainahsariwicaksono@yahoo.com

Hp : 081578383888

ABSTRAK

Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) merupakan areal penyangga sungai-sungai sebagai upaya perlindungan terhadap hidro-orologi dari hutan (Perhutani, 2010). KPS termasuk dalam kawasan perlindungan di KPH Randublatung dengan luas 1.250, 20 Ha (3,85%). Fungsi lain dari KPS yaitu sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan dan minum (habitat satwa liar) sehingga kawasan ini sangat dijaga keberadaannya dari segala aktivitas baik pengembalaan liar pembukaan lahan maupun pencurian kayu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui adanya kegiatan pengembalaan liar. Metode penelitian dengan direct observation di KPS RPH Kepoh BKPH Selogender KPH Randublatung Perum Perhutani Jawa Tengah. Hasil penelitian ditemukan adanya kasus pengembalaan liar di KPS RPH Kepoh khususnya di kawasan tanaman muda dan areal dilindungi. Vegetasi yang rusak akibat pengembalaan liar yaitu johar, mahoni, jati, trambesi, tapak leman, rumput-rumputan, nyamplung, opo-opo, lamtoro dan kesapin. Bentuk kerusakan pada tanaman muda yaitu terinjak-injak oleh hewan ternak, pucuk daun mati akibat dimakan oleh hewan ternak. Pada pohon bentuk kerusakan seperti batang dan cabang tersayat atau terpotong secara sengaja oleh pengembala ternak. Bentuk kerusakan selain pada vegetasi yaitu tanah mengalami pemedatan akibat injakan hewan ternak.

Kata kunci : Pengembalaan liar, Perhutani, Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)

PERAN PERHUTANI TERHADAP MASYARAKAT PETANI HUTAN PADA PENGEMBALAAN LIAR (STUDI KASUS RPH KEPOH JAWA TENGAH INDONESIA)

Hutan merupakan salah satu pusat keanekaragaman jenis tumbuhan yang belum banyak diketahui dan perlu terus untuk dikaji. Kawasan hutan terdapat komunitas tumbuhan yang didominasi oleh pepohonan dan tumbuhan berkayu lainnya (Spurr dan Barnes, 1980). Pohon sebagai penyusun utama kawasan hutan berperan penting dalam pengaturan tata air, cadangan plasma nutfah, penyangga kehidupan, sumber daya pembangunan dan sumber devisa negara (Desman, Milton, dan Freeman, 1977). Peranan pohon-pohon dalam komunitas hutan semakin sulit dipertahankan mengingat tekanan masyarakat terhadap kelompok tumbuhan dari waktu ke waktu terus meningkat perlu adanya pengelolaan hutan yang baik untuk menjaga keberlangsungan fungsi hutan secara optimal.

Pengelolaan hutan secara bijak diperlukan untuk mempertahankan fungsi dan keberadaan hutan. Permintaan terhadap barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh ekosistem hutan, ternyata keanekaragaman jenis barang dan jasa, kuantitasnya, dan kualitasnya telah terbukti terus meningkat dari waktu ke waktu. Sebagai gambaran, laju permintaan dunia terhadap kayu yaitu salah satu jenis barang yang secara konvensional telah melekat sebagai *trade mark* bagi hutan dalam khazanah pengetahuan umat manusia diperkirakan sebesar 3 (tiga) persen per tahun atau dua kali rata-rata laju pertumbuhan penduduk dunia, yaitu 1,5 (satu setengah) persen per tahun (Gardner dan Engelman, 1999). Pengelolaan hutan yang baik harus dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, pengelola hutan dan *stakeholders* serta lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu, pengelolaan hutan yang baik juga harus memperhatikan aspek-aspek kelestarian hutan, seperti aspek ekologi, produksi, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar hutan (Purnawan, 2006 ; Birgantoro, dan Nurrochmat, 2007).

Perum Perhutani adalah suatu badan usaha milik Negara yang mengelola dan memanfaatkan hutan secara lestari dengan mempertimbangkan segala aspek yaitu ekonomi, ekologi, dan sosial (Perhutani, 2011). Perubahan dinamika sumberdaya

hutan juga terjadi di hutan jati Perum Perhutani sebagai akibat gangguan yang ditimbulkan dari interaksi hutan dengan faktor sosial ekonomi maupun faktor pengelolaan. Beberapa gangguan dari faktor sosial ekonomi adalah adanya pencurian/penjarahan, penggembalaan liar dan kebakaran, maka perlu adanya aspek pengamanan yang berperan untuk mengurangi kerusakan hutan (Riyanto dan Pahlana, 2012).

Aspek pengamanan hutan adalah pendukung keberhasilan suatu pengelolaan dan perlindungan. Berdasarkan Departemen Kehutanan (1999) yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan beserta hasilnya yang disebabkan oleh manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam serta hama dan penyakit dan mempertahankan serta menjaga hak-hak Negara dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan hutan. Penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, kawasan hutan, dan lingkungannya agar fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi tercapai secara optimal dan lestari. Untuk itu perlu adanya upaya perlindungan hutan terhadap penggembalaan liar di RPH Kepoh, Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian telah dilakukan pada bulan Agustus di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) RPH Kepoh BKPH Selogender KPH Randublatung Perhutani Divisi Regional Jawa Tengah.

Alat dan Bahan Penelitian

Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kompas yang digunakan untuk menentukan letak titik koordinat dan arah jalur pengamatan, tali rapia digunakan untuk membuat plot vegetasi, pita ukur digunakan untuk mengukur diameter vegetasi, *christen hypsometer* digunakan untuk mengukur tinggi vegetasi dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat peristiwa pada lokasi penelitian. Bahan yang digunakan adalah hewan ternak yang berada pada areal Kawasan Perlindungan Setempat (KPS).

Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan meliputi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer meliputi data-data jenis vegetasi dan bentuk kerusakan vegetasi yang ditemui di area Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)

2. Data Sekunder

Data sekunder meliputi studi literatur yang mendukung penelitian, seperti:

- a. Karakteristik lokasi penelitian berupa keadaan umum lokasi penelitian
- b. Data pendukung lainnya yang sesuai dengan topic penelitian.

Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini meliputi:

1. Penelitian dilakukan sesuai dengan kondisi cuaca cerah dan mendung apabila hujan tidak dilakukan penelitian.
2. Sampel yang digunakan adalah kasus penggembalaan yang ditemui di kawasan pengamatan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut.

1. Data Primer

Data mengenai kasus penggembalaan diperoleh dengan menggunakan metode survei langsung dan deskriptif.

2. Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi pustaka. Metode ini digunakan untuk mencari, mengumpulkan dan menganalisis data penunjang yang terdapat dalam dokumen resmi yang dipakai sebagai bahan referensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka hasil kegiatan penelitian mengenai Peran Perhutani Terhadap Pengembalaan Liar di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) disajikan pada (Tabel 1).

Tabel 1. Kegiatan Pencegahan Pengembalaan Liar Resort Pemangkuan Hutan Kepoh Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan Selogender Kesatuan Pemangkuan Hutan Rabdublatung

No	Kegiatan	Sasaran	Target	Keterangan
1	Survey Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)	Hutan	Mengetahui kondisi Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) akibat adanya pengembalaan liar	11 Agustus 2014
2	Analisis Vegetasi di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)		Mengetahui Jumlah dan Jenis Vegetasi di Areal KPS	20 Agustus 2014
3	Mencatat Jenis dan Jumlah Pohon Yang Rusak Akibat Pengembalaan Liar	Hutan	Mengetahui Jenis Pohon dan Jumlah Pohon Yang Rusak Akibat Pengembalaan Liar	2 September 2014
4	Menghalau Pengembalaan atau pemiliknya untuk memasuki Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)	Pemilik dan Hewah Ternaknya	Mengurangi kerusakan Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)	3 September 2014
5.	Melakukan Komunikasi Sosial (Penyuluhan langsung kepada kepemilik ternak)	Masyarakat	Meningkatkan Kesadaran masyarakat akan larangan adanya pengembalaan liar di KPS	5 September 2014

1. Survei Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)

Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) merupakan areal penyangga sungai-sungai sebagai upaya perlindungan terhadap fungsi hidrologi dari hutan (Perhutani, 2010). KPS termasuk kedalam kawasan Hutan Produksi yang di peruntukan sebagai kawasan perlindungan dan luasnya di KPH Randublatung 1,250.20 Ha dengan presentasi 3,85%. Fungsi lain dari Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) yaitu sebagai tempat berlindung dan tempat mencari makan dan minum serta sebagai habitat satwa liar. Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) berdasarkan tujuannya sama seperti Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK), yaitu kawasan yang dilindungi karena berbatasan langsung dengan kawasan pemukiman penduduk dan terhadap terjadinya perambahan hutan, pencurian kayu, penggembalaan liar dan kebakaran hutan. Maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak dalam membantu mengatasi berbagai permasalahan yang ada sehingga tujuan pengelolaan kawasan ini dapat terwujud (Wakka, 2014).

Kawasan KPS memiliki jenis vegetasi yang bervariasi dan di dukung dengan keberadaannya yang dilintasi DAS (Daerah Aliran Sungai). Vegetasi Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) yaitu jenis rimba campuran. Sehingga kawasan ini sangat dijaga keberadaanya dari segala aktifitas baik penggembalaan liar, pembukaan lahan maupun pencurian kayu. Kondisi DAS yang ada di Selogender saat ini mengering dan air tidak mengalir hingga hilir sehingga kondisi air berubah keruh dan menggenang.

2. Analisis Vegetasi di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)

Analisis vegetasi adalah suatu metode untuk mengetahui jumlah populasi vegetasi yang berada di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS). Pendugaan populasi vegetasi dilakukan dengan cara pembuatan plot 20m x 20meter, 10m x 10m, 5m x5m dan 2m x 2m. Fase vegetasi yang diamati adalah fase pohon, tiang, pancang dan semai. Tujuan analisis vegetasi selain mengetahui populasi yang ada di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS), tujuan lain yaitu mengidentifikasi bentuk dan jumlah kerusakan vegetasi yang ada di KPS. Hasil Analisis Vegetasi di KPS RPH Kepoh disajikan pada (Tabel 2).

Tabel 2. Analisis Vegetasi di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) RPH Kepoh
Agustus 2014

No	Plot	Petak	Nama Tumbuhan	Tinggi (m)	Diameter (cm)
1	2x2	5x5	Trambesi	0,3	
			Tapak Leman	0,5	
			Rumput-rumputan	1,5	
		10x10	Jati	2	7
			Nyamplung	2,5	9
			Mahoni	4	15
		20x20	Johar	10	22
			Trambesi	9	21
			Jati	12	28
			Jati	17	40
2	2x2	5x5	Jati	0,3	
			Tapak leman	1,5	
			Rumput-rumputan	0,1	
		10x10	Nyamplung	0,2	
			Nyamplung	2,3	7
			Jati	1,5	5
		20x20	Johar	7	12
			Trambesi	8	14
			Jati	15	22
			Mahoni	13	24
3	2x2	5x5	Rumput-rumputan	0,3	
			Jati	1	
			Opo-opo	0,8	
		10x10	Tapak leman	0,9	
			Jati	2	7
			Jati	7	13
		20x20	Jati	8	17
			Jati	12	22
			Jati	13	24
			Lamtoro	0,7	
4	2x2	5x5	Rumput-rumputan	0,2	
			Opo-opo	0,5	
			Mahoni	2	7
		10x10	Jati	1,5	3
			Nyamplung	1	4
			Johar	6	12
		20x20	Jati	6	11
			Jati	10	22
			Jati	10	23
			Johar	12	25
5	2x2	20x20	Opo-opo	0,6	
			Kesapon	1	
			Rumput-rumputan	0,2	
			Tapak leman	0,7	

Tabel 2. Lanjutan

5x5	Nyamplung	1,7	7
	Jati	1,5	3
10x10	Jati	7	12
	Jati	8	13
20x20	Trambesi	10	20
	Trambesi	11	25
	Jati	10	22
	Johar	10	22

Setelah pengambilan data vegetasi di Kasawan Perlindungan Setempat (KPS) maka dilakukan analisis pada kerapatan vegerasi, kerapatan relatif vegetasi, frekuensi vegetasi dalam areal hutan tertentu dan frekuensi relatif vegetasi pada areal tertentu, penutupan vegetasi, penutupan relatif vegetasi dan indeks nilai penting. Menurut Curtis dan Mc. Intosh (1950); Gopal dan Bhardwaj (1979); Soegianto (1994); dan Indriyanto (2006) perhitungan dalam menganalisis vegetasi yaitu sebagai berikut.

Rumus Perhitungan Analisis Vegetasi

A. Kerapatan (K)

$$Ki = \frac{\text{Jumlah Individu Spesies ke-}i}{\text{Luas Seluruh Petak Contoh}}$$

B. Kerapatan Relatif (KR)

$$KR = \frac{\text{Kerapatan Spesies ke-}i}{\text{Kerapatan Seluruh Spesies}} \times 100\%$$

C. Frekuensi (F)

$$Fi = \frac{\text{Jumlah Petak Contoh diTemukan Suatu Spesies ke-}i}{\text{Jumlah Seluruh Petak Contoh}}$$

D. Frekuensi Relatif (FR)

$$FR = \frac{\text{Frekuensi Setiap Jenis ke-}i}{\text{Frekuensi Seluruh Jenis}} \times 100\%$$

E. Penutupan (C)

$$Ci = \frac{\text{Luas Bidang Dasar Spesies ke-i}}{\text{Luas Petak Contoh}} \times 100\%$$

F. Penutupan Relatif (CR)

$$CR = \frac{\text{Penutupan Suatu Jenis ke-i}}{\text{Penutupan Seluruh Jenis}} \times 100\%$$

G. Indeks Nilai Penting (INP)

$$INP = KR + FR + CR$$

Berdasarkan rumus untuk mengetahui kerapatan, kerapatan relatif, frekuensi, frekuensi relatif, penutupan, penutupan relatif dan indeks nilai penting. Maka dilakukan perhitungan analisis vegetasi dan disajikan pada (Tabel 3).

Tabel 3. Hasil Perhitungan Analisis Vegetasi

No	Jenis Pohon	K	KR (%)	F	FR(%)	C	CR(%)	INP
1	Johar	15	20	0,6	20	0,63	17,7	57,7
2	Trembesi	15	20	0,6	20	0,58	16,29	56,29
3	Mahoni	5	1,33	0,2	6,67	0,23	6,46	14,46
4	Jati	40	53,33	1,6	53,3	2,12	59,55	166,21
Jumlah Total		75	94,66	3	100	3,56	100	294,66

3. Inventarisasi Jenis dan Jumlah Pohon Yang Rusak Akibat Pengembalaan Liar

Kerusaan yang terjadi di areal Kawasan Pelindungan Setempat (KPS) saat ini sudah dalam kondisi yang cukup mengkhawatirkan, jika dibiarkan saja maka akan menimbulkan kerusakan yang semakin parah dan akan berdampak pada kelestarian vegetasi dan keberadaan satwa yang berada di areal tersebut. Berdasarkan pengamatan dan peninjauan langsung di lokasi Kawasan Pelindungan Setempat (KPS) ini tercatat jenis dan jumlah pohon yang berada di areal Kawasan Pelindungan Setempat (KPS). Jenis dan jumlah kerusakan vegetasi di areal KPS disajikan pada (Tabel 4).

Tabel 4. Jenis dan Jumlah Kerusakan Pada Vegetasi di Areal Kawasan Pelindungan Setempat (KPS) September 2014

No	Jenis Vegetasi	Deskripsi Kerusakan Pada Vegetasi	Jumlah dan Kondisi Vegetasi
1.	Johar	Kerusakan pada batang yaitu keadaan batang tersayat seperti dilakukan sengaja oleh pemilik ternak dengan menggunakan senjata tajam (golok atau arit)	Fase Pohon = 2 kondisi rusak, 1 kondisi baik Fase Tiang = 1 kondisi rusak, 1 kondisi baik Fase Pancang = 0 Fase Semai = 0
2.	Mahoni	Kerusakan pada bagian cabang pohon terpotong secara sengaja dimungkinkan akibat cabang menghalangi ternak sehingga pemilik memotong bagian dahan tersebut, pada mahoni muda bagian pucuk daun habis di perkirakan pucuk daun mahoni dimakan oleh hewan ternak	Fase Pohon = 1 kondisi rusak Fase Tiang = 1 kondisi rusak Fase Pancang = 0 Fase Semai = 0
3.	Jati	Kerusakan pada batang pohon, bentuk kerusakan yaitu batang tergores, diperkirakan tergoresnya batang akibat tanduk dari hewan ternak	Fase Pohon = 4 kondisi rusak dan 4 kondisi baik Fase Tiang = 1 kondisi rusak dan 4 kondisi baik Fase Pancang = 1 kondisi baik Fase Semai = 1 kondisi rusak 1 kondisi baik
4.	Trembesi	Kerusakan cabang pohon terpotong secara sengaja dimungkinkan akibat cabang menghalangi ternak sehingga pemilik memotong bagian dahan tersebut. Pada tanaman muda trembesi rusak karena terinjak-injak hewan ternak	Fase Pohon = 2 kondisi rusak Fase Tiang = 1 kondisi baik Fase Pancang = 0 Fase Semai = 1 kondisi rusak
5.	Tapak Leman	Kerusakan pada tapak leman diakibatkan terinjak-injak oleh hewan ternak	Fase Semai = 3 kondisi rusak dan 1 kondisi baik
6.	Rumput-rumputan	Kerusakan pada rumput diakibatkan karena terinjak-injak oleh hewan ternak	Fase Semai = 3 kondisi rusak dan 2 kondisi baik

Tabel 4. Lanjutan

7.	Nyamplung	Kerusakan terjadi di pucuk-pucuk daun disebabkan pucuk dimakan oleh hewan ternak hingga habis bagian pucuk (daun muda)	Fase Pancang = 2 kondisi rusak dan 2 dan kondisi baik Fase Semai = 1 kondisi baik
8.	Opo-opo	Kerusakan terjadi di pucuk-pucuk daun disebabkan pucuk dimakan oleh hewan ternak hingga habis bagian pucuk (daun muda)	Fase Semai = 1 kondisi rusak dan 2 kondisi baik
9.	Lamtoro	Kerusakan terjadi di pucuk-pucuk daun disebabkan pucuk dimakan oleh hewan ternak hingga habis bagian pucuk (daun muda)	Fase Semai = 1 Keadaan rusak
10	Kesapin	Tidak ada kerusakan	Fase Semai = 1 kondisi baik

4. Penghalauan Penggembalaan di Kawasan Perlindungan Setempat (KPS)

Penghalauan ini bertujuan agar pemilik ternak tidak memasuki Kawasan Perlindungan Setempat (KPS) dan membiarkan ternaknya mencari makan di dalam kawasan ini. Penggembalaan liar pada dasarnya dapat menurunkan tingkat kesuburan lahan dan bertambahnya lahan kritis dipercepat oleh tekanan penduduk terhadap lahan untuk keperluan pertanian dan peternakan yang sebagian besar mata pencaharian penduduk beternak dengan pola penggembalaan liar serta bertani dengan pola perladangan berpindah dengan sistem tebas bakar (Surata, 2009). Maka perlu adanya penghalauan hewan ternak yang masuk ke dalam KPS, salah satu upaya pengusiran ternak yaitu dengan metode *Represif* yaitu pengusiran ternak dari tanaman muda dengan tujuan yaitu memberikan efek jera kepada pengembala untuk tidak mengembala sembarangan.

5. Melakukan Komunikasi Sosial (Penyuluhan Langsung Kepada Kepemilikan Ternak)

Komunikasi Sosial (Komsos) merupakan cara untuk mengurangi adanya penggembalaan liar di dalam kawasan hutan. Teknis Komsos ini disesuaikan dengan kemampuan penyuluhan, bisa dengan dilakukan mengumpulkan pemilik-pemilik ternak dalam satu tempat yang sama kemudian dilakukan penyuluhan atau dapat juga dilakukan dengan cara mendatangi satu-persatu masyarakat yang memiliki hewan ternak atau di sebut anjang sana dan kemudian mulai memberikan pengarahan akan

dampak adanya pengembalaan liar di dalam kawasan terutama kawasan yang masih memiliki tumbuhan muda. Kemudian memberikan solusi untuk menangani pengembalaan liar di dalam kawasan seperti menyediakan pakan sendiri yang diambil pemilik ternak dar dalam kawasan tanpa membiarkan ternaknya masuk kedalam kawasan hutan terutama hutan yang masih memiliki tanaman muda. Komunikasi sosial ini dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki peran penting dalam pengelolaan hutan jati di Perhutani, komunikasi sosial dapat dilakukan oleh Mantri, Polhut, Kepala desa, maupun LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Komunikasi sosial kepada pemilik ternak dilakukan dengan cara persuasif tanpa ada unsur kekerasan ataupun dibawah penekanan. Komunikasi sosial merupakan salah satu cara efektif dalam mengurangi dampak bertambahnya pengembalaan liar. Sehingga pada akhirnya masyarakat dapat mengetahui dampak pengembalaan liar dan mengurangi aktifitas pengembalaan liar di dalam hutan.

Pembahasan

Menurut Sila dan Nuraeni (2009), Pengembalaan liar dimungkinkan oleh kurangnya tegal pekarangan petani yang dapat dipakai sebagai tempat pengembalaan yang mampu menampung pertumbuhan jumlah ternak. Hutan jati merupakan satu-satunya pilihan, selain karena tersedianya rerumputan liar sebagai hasil dari gugurnya daun jati dan pemanenan kayu jati juga karena dengan cara ini relatif lebih murah dibandingkan dengan cara memelihara ternak dalam kandang.

Pengembalaan liar adalah kegiatan menggembal /menggiring hewan ternak untuk mencari pakan didalam kawasan hutan. Pengertian lain yaitu penggiringan hewan ternak dari kandang ke lokasi kawasan hutan tersebut dilakukan oleh seseorang/kelompok dan setelah masuk di kawasan hutan kelompok hewan ternak tersebut ditunggui oleh pemiliknya/penggembala. Kelompok hewan ternak tersebut ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga ternak-ternak tersebut bebasberkeliaran dan ada kemungkinan masuk di tanaman muda maupun tutupan. Dan pengembalaan model ini cenderung berpotensi untuk menimbulkan kerusakan.

Dalam kasus pengembalaan liar Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Kepoh, Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) Selogender, Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Randublatung Perum Perhutani sampai saat ini masih banyak terjadi. Jika ditinjau kembali Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang mengatur pengembalaan di

KPH Randublatung menyatakan bahwa penggembalaan tidak diperbolehkan didalam kawasan hutan, kecuali kawasan yang memiliki tegakan yang umurnya dewasa, sedangkan pada tegakan muda tidak sama sekali diperbolehkan adanya penggembalaan liar. Standar Oprasional Prosedur (SOP) tentang Pengembalaan liar dalam aturan Perhutani (2012), terdapat sistem pelaporan jika terjadi pengembalaan liar di hutan muda atau tutupan yaitu : (1) Nomor huruf A, (2) Tangga dan waktu kejadian, (3) Petak yang rusak akibat, (4) Luas baku/Ha, (5) Tanaman yang rusak, tanaman yang rusak meliputi jenis tanaman, jumlah pohon dan luasan areal/Ha, (6) Besar kerugian Perhutani KPH Randublatung, (7) Penyebab kejadian, penyebab kejadian meliputi nama penggembala, jenis/jumlah hewan dan asal desa dan (8) Kronologis kejadian pengembalaan liar.

Kerusakan yang diakibatkan penggembalaan liar dapat berupa : (1) Injakan-injakan kaki ternak yang menyebabkan tanah menjadi padat dan tidak mampu lagi menyerap air sehingga menimbulkan erosi yang terutama pada tanah miring, tanah longsor, serta menggagalkan usaha reboisasi, (2) Rusaknya tegakan dan tanaman antara, kualitas produksi kayu rendah, Kebiasaan penggembala yang menginginkan hijauan muda dengan membakar hutan, akan sangat merugikan, (3) Anak-anak gembala tidak cukup waktu untuk sekolah, (4) Bagi ternak itu sendiri kerugiannya adalah kesehatannya yang kurang terjamin karena ternak-ternak itu bebas berkeliaran di hutan dan makan apa saja yang dijumpai. Sehingga dapat mudah terserang penyakit dan juga tidak dapat mengatur perkawinan dalam mencari turunan bibit unggul. Hal ini menyebabkan mutu ternak menjadi rendah.

Penggembalaan liar ini dapat diminimalisasi dampak kerugiannya, dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat desa di sekitar hutan tentang hal yang berkaitan dengan kerugian-kerugian yang dapat ditimbulkan akibat adanya penggembalaan liar. Selain itu perlu adanya ketegasan dari pihak pengelola hutan dalam menetapkan daerah-daerah yang tidak diperbolehkan adanya penggembalaan liar. Dengan demikian peran pihak pengelola hutan dalam berkomunikasi dengan masyarakat desa di sekitar hutan sangatlah penting, untuk menunjang keberhasilan dalam pengelolaan hutannya, serta keberhasilan dalam membina masyarakat desa di sekitar hutan tersebut.

Akibat yang ditimbulkan oleh adanya penggembalaan liar antara lain adalah bila pengembalaan tersebut dilakukan pada petak yang masih merupakan tanaman muda yang dapat menimbulkan kerusakan batang dan menurunkan kualitas batang. Akibat

yang lain dari pengembalaan liar di hutan adalah dapat menyebabkan pemanfaatan tanah sehingga drainase tanah menjadi buruk dan akan pertumbuhan tanaman.

1. Upaya Pencegahan Penggembalaan

Menurut Standart Operasional Prosedur (SOP) Perhutani (2012), upaya pencegahan penggembalaan yaitu : (1) Kawasan dengan tanaman hutan yang berumur lebih dari 20 tahun, karena tegakan sudah tumbuh lagi, (2) Kawasan hutan dengan kelerengan lahan kurang dari 45, untuk menjaga tumbuhan bawah tetap tumbuh, menjamin kerentanan tanah, (3) Proses Sosialisasi dan sistem informasi kepada masyarakat, (4) Memberikan penjelasan secara intensif kepada warga sekitar hutan terutama yang dekat dengan tanaman muda agar tidak menggembala atau melepaskan hewan ternaknya ke dalam hutan tanaman muda atau tutupan, (5) Sosialisasi kepada masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui media radio, media cetak lokal dll, (6) Membuat dan pasang plang larangan penggembalaan pada petek-petak tertentu.

2. Tindakan Pencegahan Penggembalaan

Tindakan bila terjadi pelanggaran dalam penggembalaan liar yaitu : (1) Menghalau hewan ternak agar keluar dari petak atau tanaman muda, hitung pohon yang rusak serta luasnya catat dalam buku saku, (2) Mencari penggembala atau pemiliknya, apabila ketemu diberi penjelasan agar tidak menggembalakan ternaknya pada tanaman muda atau tutupan, (3) Membuat pernyataan secara bersama antara KPH Randublatung, masyarakat, perangkat desa dan LMDH (bila sudah terbentuk) untuk tidak menggembalakan di hutan tanaman muda atau tutupan, jika pernah melakukan untuk tidak mengulangi lagi (Perhutani, 2012).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan yang terkait pengembalaan liar di KPH Randublatung yaitu pengembalaan liar masih banyak terjadi di dalam hutan jati baik jati berumur tua ataupun muda dan bahkan kawasan yang dijadikan sebagai tempat pelestarian flora

dan fauna masih saja ada penggembala liar yang sengaja mengembala ternaknya di dalam kawasan perlindungan setempat.

2. Upaya yang dilakukan pihak perhutani untuk mengurangi Pengembalaan liar yaitu proses sosialisasi dan sistem informasi kepada masyarakat, memberikan penjelasan secara intensif kepada warga sekitar hutan terutama yang dekat dengan tanaman muda agar tidak menggembala atau melepaskan hewan ternaknya ke dalam hutan tanaman muda atau tutupan, sosialisasi kepada masyarakat sekitar dapat dilakukan melalui media radio, media cetak lokal, membuat dan memasang plang larangan penggembalaan pada petek-petak tertentu.

Saran

Saran terkait penelitian terhadap kasus penggembalaan liar di BKPH Selogender KPH Randulatung yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya patroli rutin untuk mengurangi adanya aktifitas penggembalaan liar di dalam kawasan perlindungan setempat ataupun hutan jati muda yang terdapat di Resort Pemangkuhan Hutan (RPH) Kepoh Bagian Kesatuan Pemangkuhan Hutan (BKPH) Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Randublatung.
2. Perlu adanya fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan patroli penggembalaan seperti plang pemberitahuan larangan menggembala dan pos pemantauan penggembalaan liar.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ir. Haridian Sohartono selaku Administartur KPH Randublatung, Bapak Ence Sunarya, S.Hut selaku Kepala BKPH Selogender dan Bapak Radi selaku Kepala RPH Kepoh yang telah memberikan bimbingan dan pembelajaran selama proses penyelesaian penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Birgantoro, B.A dan D. R. Nurrochmat. 2007. *Pemanfaatan Sumberdaya Hutan oleh Masyarakat di KPH Banyuwangi Utara*. JMHT Vol. XIII (3): 172-181.
- Curtis and Mc. Intosh. 1950. *The Interralations Of Certain Analytic and Synthetic Phytosociological Characters*. Departement Of Botany University Of Wisconsin. USA.
- Departemen Kehutanan. 1999. *Undang-undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Dephut. Jakarta.
- Desmann, R.F., J.P.Milton, dan P.H. Freeman 1977. *Prinsip Ekologi untuk Pembangunan Ekonomi*. Penerjemah: Sumarwoto, O. Jakarta: P.T. Gramedia.
- Gardner, T. and R. Engelman. 1999. *Forest Future. Population Action International*, Washington D.C.
- Gopal, B. dan N. Bhardwaj. 1979. *Elements Of Ecology*. Departement Of Botany Rajasthan University Jaipur. India.
- Indrianto. 2006. *Ekologi Hutan*. PT Bumi Aksara. Jakarta
- Perhutani. 2010. *Laporan Semester I : Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode Januari-Juni 2010 KPH Randublatung*. KPH Randublatung. Jawa Tengah.
- Perhutani. 2011. *Dokumen Kajian Perburuan Liar*. KPH Randublatung. Jawa Tengah.
- Perhutani. 2012. *Buku Rancangan KPH Mandiri*. KPH Randublatung. Jawa Tengah.
- Purnawan, R. 2006. *Pemanfaatan Sumberdaya Hutan Sebagai Ekoturism Berbasis Kemasyarakatan*. Surili 2 (39): 14.
- Riyantyo, H.D dan Pahlana, U.W.H. 2012. *Kajian Evaluasi Hutan Jati Sistem Bonita Di Kesatuan Pemangkuhan Hutan (KPH) Cepu*. Jurnal Penelitian Hutan Tanaman Vol. 9 No.1, Maret 2012, 43-50.
- Sila, M dan Sitti Nuraeni . 2009 . *Buku Ajar Perlindungan dan Pengamanan Hutan* . Laboratorium Perlindungan dan Serangga Hutan . Fakultas Kehutanan Universitas Hasanudin ; Makassar
- Soegianto, A. 1994. *Ekologi Kuantitatif: Metode Analisis Populasi dan Komunikasi*. Usaha Nasional. Jakarta.
- Spurr, S.H. and B.V. Barnes. 1980. *Forest Ecology*. 3rd ed. New York: John Willey and Sons.
- Surata, I, K. 2009. *Pengaruh Ukuran Lubang Tanam Dan Kompos Kotoran Sapi Untuk Penanaman Lahan Kritis di Daerah Savana Di Pulau Sumba*. Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam Vol. VI No. 2 : 147-157.
- Wakka, A. K. 2014. *Analisis Stakeholders Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi*

Sulawesi Selatan. Jurnal Penelitian Kehutanan Wallacea Vol. 3 No. 1 April 2014 : 47-55.